

Dinasti Politik dalam Kepemimpinan Lokal: Studi Persepsi Masyarakat Sukoharjo terhadap Etik Suryani sebagai Bupati

Atsmar Hidayati Utomo¹, Rina Martini²

Email: atsmarh1@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Fenomena dinasti politik masih menjadi dinamika penting dalam demokrasi local Indonesia. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang menunjukkan keberlanjutan kekuasaan berbasis kekerabatan melalui terpilihnya Etik Suryani sebagai Bupati, yang memiliki relasi keluarga dengan kepala daerah sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi Masyarakat terhadap dinasti politik dan kepemimpinan Etik Suryani dalam konteks politik local. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan instrument kuesioner skala Likert kepada 100 responden yang dipilih melalui *convenience sampling*. Analisis dilakukan menggunakan statistik dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan Masyarakat memiliki kesadaran kognitif tinggi terhadap keberadaan dinasti politik. Pada dimensi afektif, Masyarakat cenderung merasa tidak nyaman dengan praktik politik kekerabatan. Dukungan politik Masyarakat terhadap etik Suryani bersifat pragmatis, yang lebih didasarkan pada penilaian kinerja dan keberlanjutan program dibanding loyalitas emosional terhadap keluarga politik. Kepemimpinan Etik Suryani dipersepsikan cukup positif, Meskipun Masyarakat juga menyadari adanya indikasi *elite capture*, terutama dalam bentuk dominasi jaringan keluarga dan terbatasnya peluang bagi aktor politik baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Sukoharjo bersikap kritis Namun pragmatis terhadap dinasti politik, menerima keberadaannya selama kinerja Pemerintahan dianggap memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi politik di tingkat lokal semakin dibentuk oleh evaluasi berbasis kinerja, bukan semata hubungan kekerabatan, Meskipun risiko konsentrasi kekuasaan dalam lingkaran elite keluarga tetap ada.

Kata kunci: dinasti politik, persepsi masyarakat, kepemimpinan lokal, *elite capture*, Sukoharjo

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Political dynasties remain a significant phenomenon in Indonesia's local democratic practices. Sukoharjo Regency represents one of the regions experiencing the continuity of kinship-based power through the election of Etik Suryani as Regent, who has a familial relationship with the previous regional leader. This study aims to analyze public perceptions of political dynasties and Etik Suryani's leadership within the context of local politics. This research employs a descriptive quantitative approach using a Likert-scale questionnaire distributed to 100 respondents selected through convenience sampling. Data were analyzed using descriptive statistical methods. The findings sampling indicate that the public demonstrates a relatively high level of cognitive awareness regarding the existence of political dynasties. At the affective level, the community tends to feel uncomfortable, with kinship-based politics. Public Political support for Etik Suryani largely pragmatic, primarily based on performance evaluation and program continuity rather than emotional loyalty to a political family. Her leadership is perceived as moderately positive, although respondents also recognize indications of elite capture, particularly in the form of family network dominance and limited opportunities for new political actors. The study concludes that Sukoharjo society is critical yet pragmatic toward political dynasties, accepting their presence as long as governmental performance is considered adequate. These findings suggest that political legitimacy at the local level is increasingly shaped by performance-based evaluation rather than solely by kinship ties, although the risk of power concentration within elite family circles remains.

Keywords: political dynasties, public perceptions, local leadership, elite capture, Sukoharjo

PENDAHULUAN

Demokrasi dipahami sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan serta membuka ruang partisipasi politik warga negara. Dalam demokrasi modern, partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga keterlibatan dalam berbagai proses politik (Noer, 2019). Namun dalam praktiknya, demokrasi elektoral tidak selalu menghasilkan kompetisi yang sepenuhnya setara. Prinsip *government by the people* justru dapat membuka peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam lingkup tertentu, salah satunya melalui politik kekerabatan atau dinasti politik.

Dinasti politik merujuk pada pengendalian kekuasaan publik oleh individu-individu yang memiliki hubungan keluarga dengan elite atau pejabat sebelumnya (Fitriyah, 2020; Maydani dkk., 2024). Meskipun berlangsung melalui prosedur demokratis, praktik ini berpotensi menimbulkan distorsi demokrasi, seperti melemahnya meritokrasi, terbatasnya regenerasi kepemimpinan, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan kekuasaan akibat lemahnya mekanisme kontrol dalam lingkaran elite yang saling terhubung (Gunanto, 2020).

Fenomena ini tidak terlepas dari peran partai politik. Oligarki internal partai

menyebabkan proses pencalonan kandidat cenderung sentralistik dan dikuasai elite partai, sehingga membuka ruang bagi reproduksi kekuasaan keluarga (Nur Rahmah & Maulia, 2024; Rahmanto, 2018). Dengan demikian, prosedur demokratis melalui pemilu tidak selalu menjamin kompetisi yang adil.

Praktik dinasti politik telah lama hadir di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pada Tingkat lokal, fenomena ini semakin menonjol sejak pelaksanaan pilkada langsung tahun 2005. Data Indonesian Corruption Watch menunjukkan sebagian besar provinsi penyelenggara pilkada memiliki kandidat yang terafiliasi dinasti politik. Penelitian IFAR Unika Atma Jaya Bersama Election Corner UGM dan PolGov UGM mencatat 605 kandidat berlatar belakang dinasti politik pada Pilkada 2024, dengan sebaran praktik mencapai lebih dari separuh daerah penyelenggara pilkada (Wawan S, 2024). Data tersebut menunjukkan dinasti politik menjadi pola yang semakin mengakar dalam demokrasi lokal.

Meski dinasti politik kerap dikaitkan dengan dampak negatif temuan empiris menunjukkan bahwa persepsi public tidak selalu seragam. Haliim & Hakim (2020) dalam studi di Kabupaten Kediri

memperlihatkan bahwa praktik dinasti politik dapat memperkuat pola patron-klien serta distribusi sumber daya yang cenderung menguntungkan jejaring keluarga penguasa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi kekuasaan dan sumber daya dalam lingkaran elite.

Namun demikian, penelitian lain menunjukkan sisi penerimaan publik yang berbeda. Cahyaningtyas & Affandi (2018) menemukan adanya persepsi positif masyarakat terhadap kepala daerah yang berasal dari dinasti politik karena keberhasilan pembangunan infrastruktur dan program sosial. Temuan yang beragam ini menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap dinasti politik bersifat kontekstual dan dipengaruhi pengalaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah, manfaat kebijakan, serta kondisi sosial politik lokal.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah dengan indikasi praktik dinasti politik. Etik Suryani terpilih sebagai Bupati Sukoharjo setelah sebelumnya menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan suaminya, Wardoyo Wijaya, yang menjabat dua periode. Pada Pilkada 2024, pasangan Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo menang dengan 66,8% suara sah. Kemenangan ini menunjukkan bahwa afiliasi dinasti tidak menghalangi dukungan

elektoral, terutama dikaitkan dengan visi pembangunan, program kesejahteraan, serta citra kepemimpinan.

Dalam konteks ini, persepsi masyarakat menjadi aspek penting. Persepsi merupakan proses individu menafsirkan informasi dan pengalaman sosial sehingga membentuk penilaian terhadap suatu fenomena politik (Rakhmat dalam Putri, 2024). Persepsi publik terhadap dinasti politik dapat dipengaruhi oleh pengalaman terhadap kinerja pemerintah, kedekatan sosial, manfaat kebijakan, serta nilai-nilai budaya politik lokal. Kajian mengenai dinasti politik yang menempatkan persepsi masyarakat sebagai fokus utama masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Pilkada 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap dinasti politik Etik Suryani dalam Pilkada 2024, serta faktor-faktor yang membentuk penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap fenomena tersebut. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana legitimasi sosial dinasti politik terbentuk dalam demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara empiris masyarakat mengenai dinasti politik, kepemimpinan Etik Suryani, dan *elite capture* di Kabupaten Sukoharjo. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan statistik deskriptif seperti mean, frekuensi, dan distribusi jawaban responden.

Populasi penelitian ini Adalah masyarakat kabupaten Sukoharjo yang terdaftar dalam DPT Pilkada 2024 sebanyak 684.491 pemilih yang tersebar di 12 kecamatan. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Cochran, menghasilkan kebutuhan minimal 96 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden untuk mengantisipasi data tidak layak.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan metode *convenience sampling*, yaitu responden dipilih berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan mengisi kuesioner daring (Google Form), dengan kriteria sebagai pemilih berdomisili di Sukoharjo.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari:

1. Data Primer: hasil kuesioner responden.

2. Data sekunder: dokumen, buku, dan data resmi terkait dinasti politik dan Pilkada Sukoharjo.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 4 poin

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Setuju

4 = Sangat Setuju

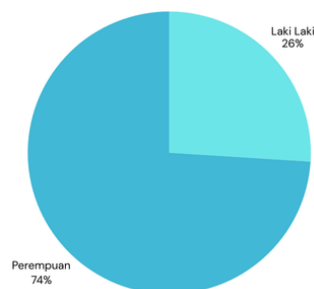
Kualitas instrumen diuji melalui uji validitas (korelasi Pearson Product Moment) dan uji realibilitas (Cronbach's Alpha > 0,60).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden, kemudian diinterpretasikan secara naratif dengan mengaitkan temuan empiris dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

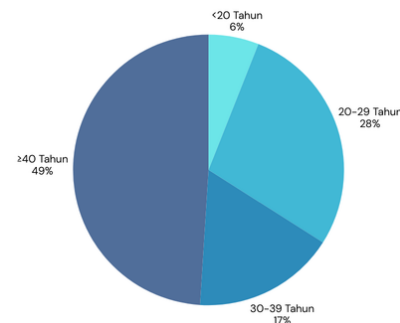
a. Jenis Kelamin



Responden yang terkumpul, menunjukkan identitas responden dengan

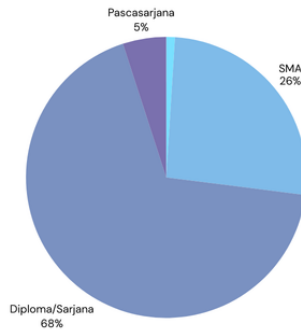
jenis kelamin laki-laki sebesar 26% dan responden berjenis kelamin Perempuan sebesar 74%. Dominasi responden perempuan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor keterjangkauan responden saat proses pengumpulan data. Pada saat penelitian dilaksanakan, responden perempuan relative lebih mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga partisipasi mereka dalam pengisian kuesioner lebih besar. Komposisi ini mencerminkan kondisi lapangan dalam proses pengambilan data dan bukan merupakan pembatasan atau pemilihan responden berdasarkan jenis kelamin.

b. Usia



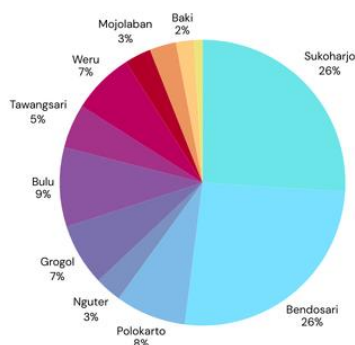
Hasil penelitian menunjukkan identitas responden berdasarkan usia. Dimana mayoritas responden berusia ≥ 40 Tahun, yaitu sebesar 49%. Kemudian responden dengan usia 30-39 tahun sebesar 17%, responden dengan usia 20-29 tahun 28% dan responden dengan usia <20 tahun adalah 6%.

c. Pendidikan



Hasil penelitian memaparkan identitas responden berdasar pendidikan terakhir yang ditempuh tiap responden. Tingkat Diploma/Sarjana memiliki jumlah persentase terbesar yaitu 68%, kemudian tingkat SMA sebesar 26%, lalu tingkat Pascasarjana sebesar 5%, tingkat SMP sebesar 1% dan responden dengan pendidikan terakhir tingkat SD tidak ada.

d. Asal Kecamatan



Hasil penelitian menunjukkan identitas responden berdasarkan kecamatan asal. Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bendosari menjadi kecamatan dengan jumlah

responden terbesar yaitu masing masing sebesar 26%. Kemudian terdapat Kecamatan Bulu sebesar 9%, juga Kecamatan Polokarto sebesar 8%. Kecamatan Weru dan Kecamatan Grogol memiliki responden sebesar 7%. Kecamatan Tawang Sari sebesar 5%. Lalu Kecamatan Nguter, Mojolaban dan Kartasura sebesar 3%. Kecamatan Baki sebesar 2%. Dan Kecamatan Gatak sebesar 1%.

Persepsi Masyarakat terhadap Dinasti Politik

Pada aspek kognitif, masyarakat menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi mengenai adanya keterkaitan hubungan keluarga dalam dinamika pencalonan kepala daerah. Responden memahami bahwa relasi kekerabatan memiliki pengaruh dalam konteks politik lokal. Temuan ini sejalan dengan studi dinasti politik lokal yang menegaskan bahwa hubungan keluarga sering menjadi faktor dalam proses suksesi kekuasaan daerah (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018).

Pada aspek afektif, responden cenderung menunjukkan ketidaknyamanan emosional terhadap kepemimpinan berbasis hubungan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa secara perasaan, masyarakat belum sepenuhnya menerima

praktik dinasti politik dalam konteks kepemimpinan daerah. Penilaian ini berada pada ranah sikap emosional Masyarakat terhadap fenomena politik yang mereka amati.

Pada aspek konatif, kecenderungan dukungan politik tidak didasarkan pada loyalitas keluarga atau faktor emosional melainkan pada pertimbangan keberlanjutan program dan manfaat kebijakan. Hal ini menunjukkan orientasi politik masyarakat bersifat evaluative-pragmatis, di mana penilaian terhadap kinerja dan manfaat kebijakan lebih menentukan dibanding ikatan dinasti.

Dimensi Dinasti Politik

Dalam dimensi patron-klien, masyarakat mengakui adanya hubungan bantuan sosial dan dukungan politik dalam dinamika lokal. Pola ini selaras dengan kosnep patronase elektoral sebagai pertukaran manfaat dengan dukungan politik (Aspinall & Sukmajati, 2016; Fitri, 2019). Relasi tersebut tidak selalu dipersepsikan sebagai paksaan, tetapi sebagai hubungan timbal balik berbasis pengalaman sosial.

Sebaliknya, budaya familisme tidak tampak dominan. Responden tidak serta merta mendukung kandidat hanya karena berasal dari keluarga pejabat. Hal ini berbeda

dengan beberapa daerah yang menunjukkan kuatnya loyalitas politik berbasis keluarga (Pradita dkk., 2025; Rusnaedy & Purwaningsih, 2018)

Pada aspek rekrutmen politik, masyarakat menilai proses pencalonan belum sepenuhnya terbuka dan kandidat dari keluarga politik belum memiliki keuntungan elektoral. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa lemahnya institusionalisasi partai politik mendorong proses seleksi kandidat berbasis jaringan kekuasaan dan sumber daya (Mietzner, 2014).

Persepsi terhadap Kepemimpinan Etik Suryani

Penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan Etik Suryani berada pada kategori cukup baik. Program dinilai bermanfaat dan kepemimpinan dianggap berjalan, namun belum menghasilkan kepuasan atau legitimasi emosional yang kuat. Dukungan masyarakat bersifat rasional-pragmatis, di mana manfaat kebijakan lebih menonjol dibanding penilaian karismatik atau ikatan personal.

Persepsi *Elite Capture*

Masyarakat memandang adanya pengaruh kuat keluarga dalam struktur politik

lokal, termasuk peran nama besar keluarga dalam kemenangan elektoral serta terbatasnya peluang bagi tokoh politik baru. Kondisi ini menunjukkan gejala *elite capture*, yaitu konsentrasi akses kekuasaan pada kelompok elite tertentu meskipun proses demokrasi elektoral berlangsung (Firdaus Arifin, 2025)

Sintesis Teoretis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen kognitif, afektif, dan konatif dalam teori persepsi tidak selalu bergerak searah (Walgito, 2001). Masyarakat memahami keberadaan dinasti politik, merasa kurang nyaman secara emosional, tetapi tetap memberikan dukungan berbasis evaluasi manfaat kebijakan. Dinasti Politik di Sukoharjo tidak hanya bertumpu pada budaya familisme, melainkan kombinasi patronase sosial, jaringan keluarga politik, serta struktur rekrutmen partai yang kurang kompetitif. Di sisi lain, persepsi *elite capture* menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan keluarga, namun legitimasi politik tetap dipengaruhi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sukoharjo memiliki

kesadaran yang cukup baik terhadap keberadaan dinasti politik dalam kepemimpinan Etik Suryani. Secara emosional masyarakat cenderung belum sepenuhnya nyaman dengan praktik politik berbasis hubungan keluarga. Dukungan politik yang muncul lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis, terutama terkait keberlanjutan program dan manfaat kebijakan yang dirasakan, bukan semata karena loyalitas terhadap keluarga politik.

Kepemimpinan Etik Suryani dipersepsikan berada pada kategori cukup baik, dengan pengakuan terhadap kebermanfaatan program, namun belum dianggap menghasilkan perubahan yang signifikan. Keberlanjutan dinasti politik di Sukoharjo tidak hanya dipengaruhi faktor kekerabatan, tetapi juga ditopang oleh struktur politik, peran partai, jaringan kekuasaan, serta proses rekrutmen kandidat yang belum sepenuhnya terbuka. Persepsi masyarakat mengenai kuatnya pengaruh nama keluarga dan terbatasnya peluang tokoh baru menunjukkan adanya indikasi *elite capture* dalam dinamika politik lokal.

Secara umum, penerimaan masyarakat terhadap figur dari keluarga politik sebelumnya berkaitan dengan budaya politik yang bersifat pragmatis dan pengalaman langsung terhadap manfaat

kebijakan. Kesadaran terhadap dinasti politik tidak otomatis berujung pada penolakan elektoral selama kepemimpinan dinilai tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap dinasti politik, kepemimpinan daerah, dan indikasi *elite capture* di Kabupaten Sukoharjo, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Perlu memperkuat transparansi kebijakan serta memperluas partisipasi publik agar legitimasi pemerintahan lebih ditopang oleh kinerja dan manfaat program, bukan semata persepsi kedekatan politik.
2. Bagi Partai Politik
Diperlukan sistem rekrutmen politik yang lebih terbuka dan berbasis merit guna menciptakan kompetisi yang lebih setara dan mencegah konsentrasi peluang politik dalam lingkaran keluarga tertentu.
3. Bagi Masyarakat
Peningkatan literasi politik dan keterlibatan dalam pengawasan kebijakan penting untuk memperkuat akuntabilitas serta kualitas demokrasi di tingkat lokal.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau studi komparatif antar daerah untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika dinasti politik dan perilaku pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Ed.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press, National University of Singapore.
- Cahyaningtyas, N., & Affandi, M. A. (2018). *POLITIK DINASTI DI KABUPATEN KEDIRI : 06*.
- Firdaus Arifin. (2025). Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 636–665.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art7>
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91–111.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.

- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Haliim, W., & Hakim, A. I. (2020). DINASTI POLITIK: BASIS POLITIK DAN KEPUASAN PUBLIK. *JURNAL POLITIK PROFETIK*, 8(2), 258. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a4>
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik Dinasti di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950–955. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075>
- Mietzner, M. (2014). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. NUS Press Pte Ltd. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1nthsj>
- Noer, H. H. (2019). Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v2i1.10021>
- Nur Rahmah, A., & Maulia, S. T. (2024). Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 118–125. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.285>
- Pradita, R. D., Apasha, R., Fatih, M. S., & Wulandari, L. (2025). Dinamika Keterwakilan Politik dalam Politik Dinasti Studi Kasus Dominasi Elit pada Era Ratu Atut di Banten. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(10), 81–90. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i10.12214>
- Putri, D. A. (2024). *Persepsi Masyarakat Kota Surakarta Terhadap dinasti Politik Joko Widodo* [Skripsi]. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(2), 103. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v3i2.116>

Walgito, B. (2001). *Pengantar Psikologi Umum*. ANDI.

Wawan S, J. H. (2024, November 20).

*Peneliti Ungkap Ada 605 Kandidat
Terkait Politik Dinasti di Pilkada
2024*. Detik Jogja.

[https://www.detik.com/jogja/pilkada/
d-7648570/peneliti-ungkap-ada-605-
kandidat-terkait-politik-dinasti-di-
pilkada-2024](https://www.detik.com/jogja/pilkada/d-7648570/peneliti-ungkap-ada-605-kandidat-terkait-politik-dinasti-di-pilkada-2024)